



**KINERJA DAN PROYEKSI PENERIMAAN
RETRIBUSI DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
pada Universitas Negeri Semarang**

Oleh

Jessica Maharani Audina Raharjo

NIM 7111415115

JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 02 Oktober 2019

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



Pembimbing



Yozi Aulia Rahman, SE., M.Sc
NIP. 198701222014041001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas
Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 15 Oktober 2019

Penguji I



Fafurida, S.E., M.Sc.

NIP. 198502162008122004

Penguji II



Karsinah, S.E., M.Si.

NIP. 197010142009122001

Penguji III



Yozi Aulia Rahman, S.E., M.Sc.

NIP. 198701222014041001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi



Heri Yanto, M.B.A., Ph.D.

NIP. 196307181987021001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jessica Maharani Audina Raharjo
NIM : 7111415115
Tempat Tanggal Lahir : Bandung, 24 Januari 1998
Alamat : Jalan Anggrek Bulan 153, Plamongan Indah,
Semarang

Menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini adalah jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 2 Oktober 2019



Jessica Maharani Audina Raharjo
NIM 7111415115

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

1. Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik. (Evelyn Underhill).
2. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. (QS. Al-Baqarah:286).
3. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. (QS. Asy Syrah:5-6).

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orangtua saya tercinta.

PRAKATA

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis diberikan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kinerja dan Proyeksi Penerimaan Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah” yang mana penelitian ini merupakan bagian dari penelitian payung yang berjudul “Model Pengembangan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah Melalui Pendekatan *Potential Mapping*”. Dalam proses penyusunan skripsi ini diselesaikan dengan baik dan berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M. Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di universitas tercinta.
2. Drs. Heri Yanto, M.B.A., Ph.D., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang dengan segala kebijakan dan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dan studi dengan baik.
3. Fafurida, S.E., M.Sc., Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang sekaligus Dosen Penguji 1 yang telah membimbing dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
4. Karsinah, S.E., M.Si., Dosen Penguji 2 yang telah membimbing dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.

5. Yozi Aulia Rahman, S.E., M.Sc, Dosen Penguji 3 sekaligus Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, waktu, dan motivasi selama pengerjaan skripsi.
6. Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Univrsitas Negeri Semarang yang telah memberikan pengarahan, motivasi, dan masukan yang bermanfaat selama menimba ilmu di Universitas Negeri Semarang.
7. Kedua orangtua dan keluarga yang selalu memberikan dukungan dalam bentuk material dan spiritual sehingga dapat membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman Ekonomi Pembangunan 2015 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Namun, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan orang lain pada umumnya. Kritik dan saran sangat penulis harapkan demi perbaikan penulis di masa yang akan datang.

Semarang, 2 Oktober 2019

Penulis

SARI

Audina, Jessica Maharani. 2019. “Kinerja dan Proyeksi Penerimaan Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah”. Sarjana Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Yozi Aulia Rahman, S.E., M.Sc.

Kata Kunci : Retribusi Daerah, Kinerja Retribusi Daerah, Proyeksi.

Realisasi retribusi daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2018 merupakan penyumbang terendah dibandingkan sumber pendapatan PAD lainnya seperti pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan lain-lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja retribusi daerah Provinsi Jawa Tengah, menggali potensi retribusi daerah dan mengetahui proyeksi penerimaan retribusi daerah 2019-2024.

Metode yang digunakan adalah perhitungan rasio tingkat kontribusi, efektivitas dan pertumbuhan untuk mengukur kinerja retribusi daerah yang kemudian dapat mengkategorikan retribusi daerah dalam matriks potensi, selain itu metode kuadrat terkecil digunakan untuk proyeksi penerimaan retribusi daerah tahun 2012-2018.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi perjenis retribusi daerah termasuk kedalam kategori sangat kurang, baik terhadap PAD maupun total retribusi. Pertumbuhan agregat retribusi daerah sebesar 6,64% sedangkan pertumbuhan perjenis retribusi daerah menunjukkan nilai yang negatif dan positif. Efektivitas agregat termasuk kedalam kategori sangat efektif dengan memiliki rata-rata sebesar 101,9%, sedangkan perjenis retribusi daerah efektivitas tertinggi adalah retribusi biaya cetak peta sebesar 252,2% sehingga termasuk kedalam kategori sangat efektif. Jenis retribusi yang termasuk kategori potensial adalah retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pemakaian kekayaan daerah dan retribusi penjualan produk usaha daerah. Proyeksi agregat retribusi daerah tahun 2019-2024 terus meningkat sedangkan proyeksi perjenis retribusi daerah tidak selalu meningkat bahkan beberapa jenis retribusi daerah terus menurun hingga mencapai angka negatif.

Saran yang diberikan adalah sosialisasi kepada masyarakat mengenai retribusi daerah harus lebih digalakkan agar terciptanya kesadaran untuk menjalankan kewajibannya dalam berkontribusi langsung untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah yang nantinya akan berdampak pada peningkatan PAD.

ABSTRACT

Audina, Jessica Maharani. 2019. "Performance and Projection of Retribution in Central Java Province". Bachelor of Economics Development. The Faculty of Economics. Universitas Negeri Semarang. Advisor Yozi Aulia Rahman, S.E., M.Sc

Keywords: Regional Retribution, Regional Retribution Performance, Projection.

The realization of regional retribution in Central Java Province in 2012-2018 is the lowest contributor compared to other Original Local Revenue sources such as local taxes, the results of regional wealth management and other incomes. This study aims to determine and analyze the performance of regional retribution in Central Java Province, explore the potential of regional retribution and determine the projected acceptance of regional retribution in the next six years. The research methods used in this study are the ratio's calculation of the level of contribution, the effectiveness and the growth to measure regional retribution performance which later can categorize the regional retribution in the potential matrix, in addition the least quadrate method is used for the projection of acceptance of regional retribution in 2019-2024.

The results show that the contribution of per regional retribution type is included in the category of very less, both to the Original Local Revenue and to the total retribution. The growth of the regional retribution aggregate is 6.64% while the growth of per regional retribution type shows negative and positive values. The effectiveness of aggregate is included in the category of very effective with an average of 101.9%, while the highest effectiveness of per retribution type is the cost of map printing of 252.2% so that it is included in the category of very effective. Types of retribution included in the potential category are health service user fees, the use of regional assets and sales of regional business products. The projected aggregate of regional retribution in 2019-2024 continues to increase while the per retribution type projection of the regional retribution do not always increase even some types of the local retribution keep decreasing until it reaches a negative number.

The advice given is that socialization to the society regarding to the regional retribution should be encouraged so that society's awareness is created to carry out its obligations in directly contributing to increase the acceptance of regional retribution which later will have an impact on increasing Original Local Revenue.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA.....	vi
SARI	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	8
1.3.Cakupan Masalah.....	9
1.4.Rumusan Masalah.....	10
1.5.Tujuan Penelitian	11
1.6.Manfaat Penelitian	11
1.7.Orisinalitas Penelitian.....	11
BAB II.....	14
KAJIAN PUSTAKA.....	14
2.1.Kajian Teori Utama	14
2.1.1 Pembangunan Daerah	14
2.1.2 Otonomi Daerah.....	15
2.1.3 Desentralisasi Fiskal	17
2.1.4 Pendapatan Daerah.....	19
2.1.5 Retribusi Daerah	21

2.2. Kajian Variabel Penelitian	24
2.2.1 Kinerja Retribusi Daerah	24
2.2.2 Potensi Pendapatan Daerah	26
2.2.3 Matriks Potensi Retribusi Daerah	28
2.2.4 Proyeksi Retribusi Daerah	28
2.3. Penelitian Terdahulu	29
2.4. Kerangka Berpikir	39
BAB III	38
METODE PENELITIAN.....	38
3.1. Jenis Penelitian dan Sumber Data.....	38
3.2. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	38
3.2.1 Variabel Penelitian.....	38
3.2.2 Definisi Operasional Variabel.....	38
3.3. Teknik Pengumpulan Data	39
3.4. Teknik Analisis Data	40
3.4.1 Kinerja Retribusi Daerah	40
3.4.2 Matriks Potensi	42
3.4.3 Proyeksi Penerimaan Retribusi Daerah dengan Metode Kuadrat Terkecil (<i>Least Square</i>).....	44
BAB IV	46
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	46
4.1. Hasil Penelitian.....	46
4.1.1 Analisis Kinerja Retribusi Daerah	46
4.1.2 Matriks Potensial Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah	61
4.1.3 Proyeksi Penerimaan Retribusi Daerah.....	65
4.2. Pembahasan	68
4.2.1 Analisis Kinerja Retribusi Daerah	68
4.2.2 Matriks Potensi Retribusi Daerah	73
4.2.3 Proyeksi Penerimaan Retribusi Daerah.....	74
BAB V	77
KESIMPULAN DAN SARAN.....	77
5.1. Kesimpulan.....	77
5.2. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN.....	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Pendapatan Daerah Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2012-2018 (dalam jutaan).....	4
Tabel 2. 1 Klasifikasi Retribusi Daerah	23
Tabel 2. 2 Ringkasan Penelitian Terdahulu	29
Tabel 3. 1 Klasifikasi Kriteria Kontribusi Retribusi Daerah.....	41
Tabel 3. 2 Interpretasi Nilai Efektivitas.....	42
Tabel 3. 3 Matriks Potensi Retribusi Daerah	44
Tabel 4. 1 Tingkat Kontribusi Agregat Retribusi Daerah terhadap PAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2018 (dalam rupiah).....	46
Tabel 4. 2 Tingkat Efektivitas Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2018 (dalam rupiah).....	48
Tabel 4. 3 Tingkat Kontribusi Retribusi Jasa Umum terhadap PAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2018	49
Tabel 4. 4 Tingkat Kontribusi Retribusi Jasa Usaha terhadap PAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2018	50
Tabel 4. 5 Tingkat Kontribusi Retribusi Perizinan Tertentu terhadap PAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2018.....	51
Tabel 4. 6 Tingkat Kontribusi Retribusi Jasa Umum terhadap Total Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2018	52
Tabel 4. 7 Tingkat Kontribusi Retribusi Jasa Usaha terhadap Total Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2018	53
Tabel 4. 8 Tingkat Kontribusi Retribusi Perizinan Tertentu terhadap Total Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2018.....	54
Tabel 4. 9 Tingkat Efektivitas Retribusi Jasa Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2018	59
Tabel 4. 10 Tingkat Efektivitas Retribusi Jasa Usaha Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2018	60
Tabel 4. 11 Tingkat Efektivitas Retribusi Perizinan Tertentu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2018	61

Tabel 4. 12 Matriks Potensial Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah	62
Tabel 4. 13 Matriks Potensi Retribusi Daerah Jawa Tengah	63
Tabel 4. 14 Proyeksi Penerimaan Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024 (dalam rupiah).....	65
Tabel 4. 15 Proyeksi Penerimaan Retribusi Jasa Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024 (dalam rupiah).....	66
Tabel 4. 16 Proyeksi Penerimaan Retribusi Jasa Usaha Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024	67
Tabel 4. 17 Proyeksi Penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2018 (dalam jutaan).....	5
Gambar 1. 2 Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2018 (dalam jutaan).....	7
Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir	40
Gambar 4. 1 Tingkat Pertumbuhan Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2018	47
Gambar 4. 2 Tingkat Pertumbuhan Retribusi Jasa Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2018	56
Gambar 4. 3 Tingkat Pertumbuhan Retribusi Jasa Usaha Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2018	57
Gambar 4. 4 Tingkat Pertumbuhan Retribusi Perizinan Tertentu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2018	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Izin Observasi ke Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.....	84
Lampiran 2. Surat Permohonan Izin Observasi ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.....	85
Lampiran 3. Surat Balasan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.....	86
Lampiran 4. Surat Balasan dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.....	88
Lampiran 5. Target dan Realisasi Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2018 (dalam rupiah).....	89
Lampiran 6. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2018 (dalam rupiah).....	89
Lampiran 7. Target dan Realisasi Perjenis Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2018 (dalam rupiah).....	90
Lampiran 8. Tingkat Kontribusi Agregat Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 2012-2018 Terhadap PAD.....	93
Lampiran 9 . Tingkat Kontribusi Perjenis Retribusi Provinsi Jawa Tengah 2012-2018 Terhadap PAD.....	93
Lampiran 10. Tingkat Kontribusi Perjenis Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 2012-2018 Terhadap Total Retribusi Daerah.....	94
Lampiran 11. Tingkat Pertumbuhan Agregat Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 2012-2018.....	95
Lampiran 12. Tingkat Pertumbuhan Perjenis Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 2012-2018.....	95
Lampiran 13. Tingkat Efektivitas Agregat Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 2012-2018.....	96
Lampiran 14. Tingkat Efektivitas Perjenis Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 2012-2018.....	97
Lampiran 15. Proyeksi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2019-2024.....	98

Lampiran 16. Proyeksi Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun 2019-2024.....	98
Lampiran 17. Proyeksi Penerimaan Retribusi Biaya Cetak Peta Tahun.....	98
Lampiran 18. Proyeksi Penerimaan Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang Tahun 2019-2024	99
Lampiran 19. Proyeksi Penerimaan Pelayanan Pendidikan Tahun 2019-2024 ...	99
Lampiran 20. Proyeksi Penerimaan Pelayanan Persampahan/ Kebersihan Tahun 2019-2024	99
Lampiran 21. Proyeksi Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2019-2024	99
Lampiran 22. Proyeksi Penerimaan Retribusi Tempat Pelelangan Tahun 2019-2024.....	100
Lampiran 23. Proyeksi Penerimaan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa tahun 2019-2024	100
Lampiran 24. Proyeksi Penerimaan Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga Tahun 2019-2024	100
Lampiran 25. Proyeksi Penerimaan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Tahun 2019-2024	100
Lampiran 26. Proyeksi Penerimaan Retribusi Izin Trayek Tahun 2019-2024...	101
Lampiran 27. Proyeksi Penerimaan Retribusi Perizinan Usaha Perikanan Tahun 2019-2024	101
Lampiran 28. Proyeksi Penerimaan Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing Tahun 2019-2024	101
Lampiran 29. Klasifikasi Matriks Potensi Perjenis Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berdasarkan Kontribusi Perjenis Retribusi Daerah Terhadap PAD)	102
Lampiran 30. Klasifikasi Matriks Potensi Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berdasarkan Kontribusi Perjenis Retribusi Daerah Terhadap Total Retribusi Daerah).....	103
Lampiran 31. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2018. (dalam rupiah)	104

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak tanggal 1 Januari 2001 pemerintah memberlakukan otonomi daerah, yang berarti setiap daerah memiliki hak dan wewenang dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerahnya. Otonomi daerah diharapkan mampu mewujudkan aspirasi warga daerahnya, karena Pemerintah Daerah dianggap lebih dekat kepada masyarakat. Otonomi daerah memiliki beberapa tujuan antara lain untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan sosial, pemerataan wilayah daerah, terjalinnya hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan mendorong pemberdayaan masyarakat.

Tujuan dari implementasi otonomi daerah adalah memberikan kewenangan yang seluas-luasnya dalam mengelola segala macam potensi maupun kekayaan daerah. Otonomi daerah juga memberikan kewenangan yang lebih banyak dalam mengelola keuangan daerah atau desentralisasi fiskal. Otonomi daerah merupakan wujud dari asas desentralisasi, yang merupakan sebuah konsep adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah ditingkat bawah untuk mengurus wilayahnya sendiri.

Desentralisasi merupakan lawan kata dari sentralisasi atau pemusatan yang berkaitan dengan wewenang pemerintah. Desentralisasi merupakan pelimpahan wewenang yang lebih luas dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan

didukung dengan dana, jadi ada tugas, wewenang dan biaya. Dalam pemerintahan di Indonesia kita mengenal dengan istilah desentralisasi fiskal yang merupakan salah satu mekanisme transfer APBN untuk mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan dan memberikan stimulus terhadap aktivitas perekonomian masyarakat. Harapannya dengan desentralisasi fiskal akan menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang sepadan dengan kewenangan urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah otonom (Rahayu, 2010:115).

Salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Maka pemerintah daerah dapat memungut berbagai macam jenis pajak dan retribusi daerah maupun pendapatan lain yang sah masyarakat dari masyarakat untuk membiayai berbagai macam pembangunan di daerahnya masing-masing. Karena dalam otonomi fiskal yang menjadi sumber pendapatan utama daerah adalah pendapatan yang diterima yang berasal dari sumber-sumber yang dikelola oleh pemerintah daerah itu sendiri (*local source*). (Rahayu, 2010:117).

Undang Undang nomor 32 tahun 2004 menjelaskan mengenai pemerintah pusat memberikan kewenangan sebesar-besarnya kepada pemerintah daerah baik pemerintah provinsi/kabupaten/kota untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri terkait dengan urusan administrasi maupun fiskal. Dengan wewenang yang luas tersebut diharapkan masing-masing daerah dapat berusaha memaksimalkan seluruh potensi-potensi yang dimiliki yang dapat digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu pemerintah daerah memerlukan modal

untuk mencapai harapan tersebut. Modal yang berasal dari daerah itu sendiri disebut Pendapatan Asli Daerah (PAD). Besar kecilnya PAD pada suatu daerah menggambarkan keberhasilan daerah tersebut dalam mengelola sumber-sumber pendapatan yang ada. Semakin besar penerimaan pajak dan retribusi di suatu daerah terhadap total belanja maka semakin mandiri daerah tersebut dalam mengelola sumberdaya dan potensi-potensi daerah yang ada, artinya daerah tersebut tidak bergantung pada pemerintah pusat.

Meskipun demikian pemerintah pusat tetap memberikan dana perimbangan kepada daerah yang berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Tujuannya agar pemerintah daerah dapat memaksimalkan sumber-sumber pendapatan tersebut agar pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan pemerintah daerah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah berlomba-lomba untuk menggali potensi pendapatan daerah dengan berbagai program atau kebijakan.

Salah satunya adalah Pulau Jawa yang memiliki beberapa Provinsi dengan tingkat pendapatan daerah yang berbeda-beda. Pulau Jawa bisa disebut sebagai pusat perekonomian, karena banyaknya kegiatan perekonomian dan industri di Pulau Jawa dibandingkan dengan pulau lainnya. Menurut kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Pulau Jawa masih menjadi andalan sebagai lokasi untuk mendorong pertumbuhan industri, bahkan penyebaran industri di Indonesia sebesar 75% berada di Pulau Jawa dan sisanya sebesar 25% berada di luar Pulau Jawa. Hal tersebut dikarenakan dari sisi sumber daya manusia, infrastruktur, dan sumber daya alam Pulau Jawa lebih siap dibandingkan dengan

daerah lainnya. Dengan demikian banyaknya potensi penerimaan pendapatan daerah dari Pulau Jawa. Untuk lebih jelasnya tabel 1.1 memaparkan pendapatan daerah di berbagai Provinsi di Pulau Jawa.

**Tabel 1. 1 Pendapatan Daerah Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2012-2018
(dalam jutaan)**

Provinsi	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
DKI Jakarta	30.642.744	41.525.337	64.715.735	44.209.238	59.004.784	62.466.130	66.029.983
Jawa Barat	14.626.494	16.651.602	19.907.973	24.009.980	26.806.857	30.540.901	31.961.201
Jawa Tengah	10.833.744	11.930.237	13.737.158	16.828.153	22.026.201	23.467.518	24.413.659
Jawa Timur	11.523.017	14.996.874	17.411.309	22.228.450	22.663.137	27.932.994	29.024.306
Banten	3.902.075	5.718.701	6.878.072	7.328.220	8.005.287	9.790.923	10.365.616
DI Yogyakarta	1.935.448	2.286.855	3.100.198	3.400.014	3.921.068	4.988.379	5.182.969

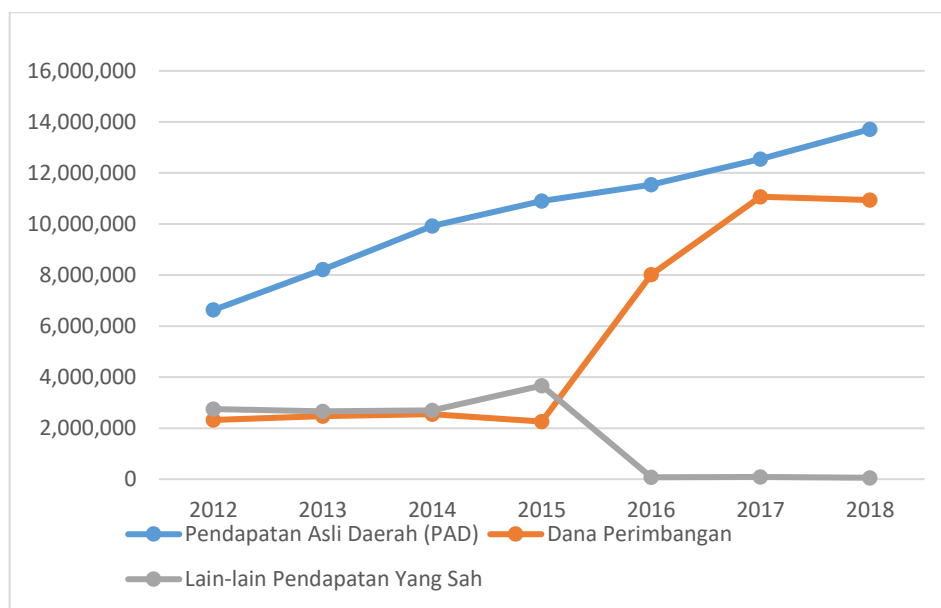
Sumber :DJPK Kementerian Keuangan RI

Tabel 1.1 menunjukkan pendapatan daerah di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten dan DI Yogyakarta. Setiap tahunnya pendapatan daerah di setiap provinsi selalu mengalami peningkatan yang cukup stabil antara satu provinsi dengan provinsi lainnya. Pendapatan daerah tertinggi dimiliki oleh DKI Jakarta, selanjutnya Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, dan yang terakhir DI Yogyakarta. Provinsi yang dapat dikatakan memiliki wilayah yang besar adalah Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah, sedangkan DKI Jakarta, DI Yogya dan Banten memiliki wilayah yang tidak cukup luas dibandingkan yang lainnya.

Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi dengan wilayah yang luas di Pulau Jawa, namun memiliki pendapatan daerah terendah dibandingkan dengan Jawa Barat dan Jawa Timur. Padahal Jawa Tengah memiliki 35 Kabupaten/ Kota

lebih banyak dibandingkan dengan Jawa Barat yang hanya memiliki 27 Kabupaten/ Kota. Artinya Jawa Tengah kurang memaksimalkan potensi penerimaan pendapatan daerahnya.

Maka dari itu dalam gambar 1.1 menjelaskan mengenai perkembangan pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2012-2018 untuk memperjelas bagaimanakah perkembangan pendapatan daerah setiap tahunnya. Berikut gambaran perkembangan pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah yang ditampilkan dalam gambar 1.1.



Gambar 1. 1 Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2018 (dalam jutaan)

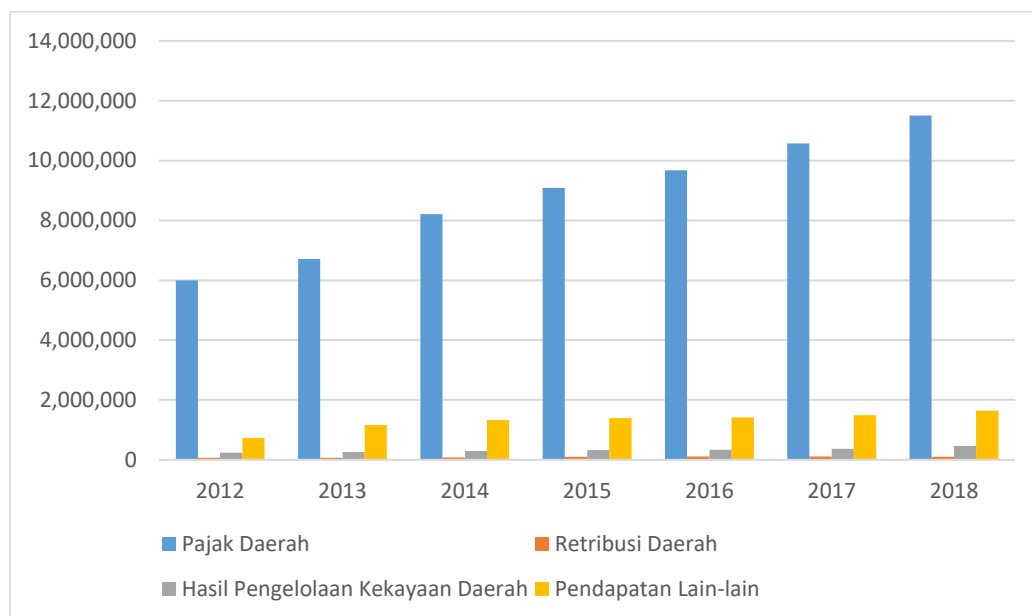
Sumber : BPPD Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan gambar 1.1 menunjukkan bahwa setiap tahunnya pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan yang cukup stabil. PAD yang menjadi andalan sebagai penerimaan pendapatan daerah juga terus meningkat dengan stabil. Namun seiring dengan meningkatnya PAD pada tahun 2012-2018 dana perimbangan meningkat secara drastis pada tahun 2016,

meningkatnya dana perimbangan berarti mengindikasikan adanya masalah ketergantungan fiskal daerah Provinsi Jawa Tengah dengan pemerintah pusat. Dana perimbangan bersumber atau diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah berupa DAU dan DAK.

Menurut Kuncoro (2004), permasalahan yang sering terjadi terkait dengan diberlakukannya otonomi daerah dan desentralisasi adalah bagaimana daerah dapat mengatasi ketergantungan terhadap pemerintah pusat dalam hal ketergantungan fiskal untuk kebutuhan segala kegiatan pembangunan daerah. Jika dana perimbangan yang diberikan mengalami penurunan, maka dapat terjadi penurunan dalam pendapatan daerah dan dapat berdampak pada penurunan belanja daerah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah daerah belum memaksimalkan segala bentuk potensi di daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bahkan menurut Bhattacharyya et al (2017), *intergovernmental transfer* (dana perimbangan) dari pemerintah pusat merespon lebih cepat daripada pendapatan yang dihimpun sendiri.

Tingginya angka dana perimbangan menunjukkan adanya kendala dalam penerimaan sumber-sumber PAD itu sendiri yakni terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan lain-lain. Pada Gambar 1.1 ditampilkan perkembangan PAD tahun 2011-2017.



Gambar 1. 2 Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2018 (dalam jutaan)

Sumber : BPPD Provinsi Jawa Tengah

Gambar 1.1 menjelaskan mengenai PAD Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2018, dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun PAD mengalami peningkatan secara stabil. Penerimaan PAD terbesar disumbangkan dari Pajak Daerah kemudian pendapatan lain-lain, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan yang terakhir adalah retribusi daerah. Jadi pajak daerah berada di urutan pertama penerimaan PAD dan retribusi daerah berada di urutan terakhir, atau dengan kata lain retribusi daerah menjadi sumber penerimaan PAD terendah dibandingkan sumber penerimaan lainnya.

Penerimaan retribusi daerah mengalami peningkatan dari tahun 2012-2017 dan menurun di tahun 2018. Pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan menjadi sumber penerimaan PAD yang utama, namun berdasarkan data gambar 1.1 retribusi menjadi sumber penerimaan yang terendah. Rendahnya kesadaran masyarakat menjadi salah satu masalah dalam hal ini, seharusnya melalui retribusi

daerah masyarakat dapat berkontribusi langsung dalam upaya peningkatan PAD. Retribusi daerah diharapkan menjadi salah satu penyumbang yang tinggi bagi pemerintah daerah, khususnya yang berasal dari PAD.

Hasil penelitian yang dilakukan Syafitri (2016) menunjukkan bahwa di tahun 2011-2013 rata-rata pertumbuhan retribusi daerah sebesar -3,53 dengan kriteria kurang berhasil dan kontribusi retribusi daerah terhadap PAD rata-rata hanya mencapai 23,51% dengan kriteria cukup. Retribusi daerah merupakan penerimaan daerah yang potensial dalam kepentingan pembangunan daerah, karena sumbangannya yang diharapkan cukup memenuhi pembiayaan pemerintah daerah. Karena objek retribusi daerah digunakan oleh kehidupan masyarakat secara langsung. Dengan analisis potensi yang dilaksanakan setiap tahun, maka diharapkan daerah dapat memanfaatkan potensi yang ada semaksimal mungkin demi kepentingan pembangunan di daerahnya. (Jufrizen, 2014).

Kondisi yang dialami oleh pemerintah daerah Jawa Tengah tentunya membutuhkan suatu upaya lebih untuk memaksimalkan segala potensi yang ada di Jawa Tengah untuk mendorong PAD melalui penerimaan retribusi daerah. Oleh karena itu penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah dengan tujuan menggali potensi retribusi daerah secara lebih baik dan dapat dimaksimalkan untuk mendorong penerimaan PAD.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jawa Tengah masih bergantung pada pemerintah pusat karena dana perimbangan yang cenderung terus mengalami peningkatan.
2. Penerimaan retribusi daerah di Jawa Tengah menjadi penerimaan terendah di PAD dibandingkan dengan sumber penerimaan lainnya seperti pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan lain-lain.
3. Pemerintah belum memaksimalkan potensi daerah yang ada untuk mendorong peningkatan penerimaan retribusi daerah.

1.3. Cakupan Masalah

Cakupan masalah dalam penelitian ini yaitu, penelitian dilakukan pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, periode yang digunakan dalam penelitian ini yakni pada tahun 2012-2018. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), kontribusi retribusi terhadap PAD, tingkat pertumbuhan retribusi, efektivitas retribusi dan proyeksi retribusi Provinsi Jawa Tengah. Jenis retribusi yang diteliti adalah retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

Pada retribusi jasa umum antara lain retribusi pelayanan kesehatan, retribusi biaya cetak peta, retribusi pelayanan tera/ tera ulang, retribusi pelayanan pendidikan dan retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan. Untuk retribusi jasa usaha antara lain retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi tempat pelelangan, retribusi tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa, retribusi pelayanan tempat olahraga dan retribusi penjualan produksi usaha daerah. Dan retribusi perizinan tertentu antara lain retribusi izin trayek, retribusi izin usaha perikanan dan retribusi izin mempekerjakan tenaga asing.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas sebelumnya, Indonesia telah melaksanakan otonomi daerah, dimana ada asas desentralisasi fiskal didalamnya, berarti setiap daerah memiliki hak dan wewenang dalam mengatur wilayahnya sendiri, sehingga pemerintah daerah berhak memungut penerimaan sumber-sumber penerimaan daerah yang sah dari masyarakat. Namun yang menjadi masalah dalam desentralisasi fiskal adalah ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Karena pemerintah pusat tetap memberikan dana perimbangan yang bertujuan agar pemerintah daerah dapat memaksimalkan sumber-sumber pendapatan.

Jawa Tengah menjadi salah satu daerah yang masih bergantung kepada pemerintah pusat, karena pendapatan yang didapatkan dari dana perimbangan terus meningkat setiap tahunnya. Selain itu, jika dilihat lebih rinci lagi dari PAD Provinsi Jawa Tengah penerimaan retribusi daerah merupakan penyumbang terendah PAD, padahal seharusnya retribusi daerah menjadi andalan dalam PAD. Dari rumusan masalah tersebut maka timbul pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam mengelola retribusi daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2012-2018?
2. Bagaimana Matriks potensi retribusi daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2012-2018?
3. Bagaimana proyeksi retribusi daerah Provinsi Jawa Tengah 2019-2024?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menyusun dan menganalisis kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah dalam mengelola retribusi daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2012-2018.
2. Untuk menyusun dan menganalisis matriks potensi retribusi daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2012-2018.
3. Untuk menyusun dan menganalisis proyeksi retribusi daerah Provinsi Jawa Tengah pada 2019-2024.

1.6. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah wawasan mengenai potensi retribusi daerah. Dan penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti yang memiliki permasalahan sejenis dengan penelitian ini.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat memberikan informasi referensi yang bertujuan untuk pengambilan keputusan bagi pemangku pemerintahan yang berkaitan dengan retribusi daerah.

1.7. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam penelitian ini objek yang akan diteliti adalah retribusi daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2018 adapun penghitungan kinerja pemerintah

dengan menganalisis kontribusi, pertumbuhan dan efektivitas retribusi daerah Jawa Tengah yang selanjutnya menjadi dasar klasifikasi matriks potensial. Selanjutnya untuk memproyeksikan penerimaan retribusi daerah 2019-2024 menggunakan metode kuadrat terkecil.

Pada penelitian Lumikis (2015) meneliti mengenai analisis potensi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan PAD di Kab/Kota Maluku Utara, jika dibandingkan dalam penelitian ini maka memiliki persamaan sama-sama menganalisis potensi penerimaan, namun dalam penelitian ini lebih terfokus pada retribusi daerah saja selain itu tempat penelitian juga berbeda. Penelitian berada di Kab/ Kota Maluku Utara sedangkan dalam penelitian ini berlokasi di Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya analisis yang digunakan adalah analisis komparatif dan analisis data histori, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan analisis kinerja pemerintah yang berupa kontribusi, pertumbuhan dan efektivitas untuk menganalisis potensi retribusi daerah.

Pada penelitian Liputo,dkk (2017) yang meneliti mengenai analisis potensi penerimaan retribusi daerah pada pemerintah Kabupaten Gorontalo selain lokasi penelitian berbeda, teknik analisis yang digunakan juga berbeda. Teknik analisis yang digunakan menggunakan pendekatan studi kasus dan wawancara yang mendalam. Dalam penelitian Syafitri (2016) mengenai analisis pertumbuhan dan kontribusi pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah terhadap pendapatan Asli Daerah Jawa Tengah terdapat persamaan perhitungan kontribusi, efektivitas dan pertumbuhan juga lokasi penelitian yaitu Jawa Tengah, namun

penelitian ini tidak berfokus pada retribusi daerah saja melainkan meneliti mengenai pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Kannapadang (2015) penelitian mengenai proyeksi potensi penerimaan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Toraja Utara Periode 2015 s/d 2019 memiliki persamaan menggunakan metode regresi linier sederhana namun memiliki perbedaan lokasi penelitian. Sedangkan pada penelitian Sartika (2019) yang meneliti mengenai analisis potensi penerimaan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD di Provinsi Sumatera Barat, perbedaan dengan penelitian ini adalah teknik analisis proyeksi penerimaan retribusi daerah. Dalam penelitian ini perhitungan proyeksi menggunakan teknik anuitas, sedangkan dalam penelitian ini perhitungan proyeksi menggunakan regresi linier berganda atau kuadrat terkecil.

Berdasarkan penjelasan tersebut, meskipun terdapat beberapa persamaan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya namun dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu. Dengan demikian penelitian ini benar-benar penelitian yang asli dilakukan oleh peneliti.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Kajian Teori Utama

2.1.1 Pembangunan Daerah

Katz (1971) berpendapat bahwa pembangunan sebagai proses perubahan yang terencana dari suatu situasi nasional yang satu ke situasi nasional yang lain yang lebih tinggi. Sedangkan Esman (1991) menyatakan bahwa hakikat dari pembangunan adalah kemajuan yang mantap dan terus-menerus menuju perbaikan kondisi kehidupan manusia dan Todaro (1986) mengemukakan bahwa pembangunan merupakan proses menuju perbaikan taraf kehidupan masyarakat secara menyeluruh dan bersifat dinamis. (Tjokrowinoto, 1897).

Masalah pokok dalam pembangunan daerah terletak pada penekanan terhadap kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan karakteristik daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan dan sumberdaya fisik secara lokal. Orientasi ini mengarahkan pada tumbuhnya inisiatif dan kreatifitas dari daerah dalam proses pembangunan. (Munir,2002).

Kuncoro (2004) berpendapat bahwa teori pembangunan yang ada selama ini belum berhasil menangani permasalahan yang ada di daerah. Maka dari itu sangat penting untuk melakukan perumusan ulang paradigma baru perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang lebih komprehensif. Paradigma baru pembangunan ekonomi di daerah sangat mengandalkan pada adanya potensi penduduk setempat sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal ini ukuran keberhasilan

bukanlah banyaknya perusahaan yang berdiri, tetapi seberapa besar angkatan kerja di lingkungan sekitar yang berhasil diserap oleh kegiatan pembangunan. Selain itu pertimbangan keberhasilan bukan terletak pada seberapa banyak aset fisik yang dimiliki namun pada kualitas lingkungan dan pengembangan kelembagaan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pembangunan daerah tidak hanya memerhatikan fenomena ekonomi saja, namun memerhatikan bidang sosial. Dalam proses pembangunan selain mempertimbangkan pertumbuhan dan pemerataan, dampak aktivitas ekonomi terhadap kehidupan sosial masyarakat juga perlu diperhatikan. Dalam pembangunan daerah beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain, peningkatan potensi daerah, peningkatan kegiatan produktif daerah dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Beberapa pengertian diatas dapat dirangkum bahwa pembangunan daerah adalah proses perubahan terencana yang sesuai dengan kekhasan karakteristik, aspirasi, dan kreatifitas daerah, meliputi seluruh bidang/fungsi yang diserahkan kepada daerah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dengan menggunakan potensi sumberdaya yang dimilikinya dalam kerangka otonomi daerah dengan memerhatikan bidang ekonomi dan bidang sosial masyarakat.

2.1.2 Otonomi Daerah

Undang-Undang N0. 22 Tahun 1999 merupakan landasan bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa otonomi daerah diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip

demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan keanekaragaman potensi daerah. Dengan adanya undang-undang tersebut artinya daerah diberi kewenangan yang utuh untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah. (Mardiasmo, 2002:8).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah merupakan kewenangan dan kewajiban dari daerah untuk mengatur dan mengurus suatu kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat dan sesuai dengan perundang-undangan. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa pemberian otonomi pada daerah kabupaten dan daerah kota didasarkan pada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, serta agama. Disamping itu, keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.

Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah, sedangkan yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar-daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.3 Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi merupakan lawan kata dari sentralisasi atau pemusatan yang berkaitan dengan wewenang pemerintah. Desentralisasi merupakan pelimpahan wewenang yang lebih luas dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan didukung dengan dana, jadi ada tugas, wewenang dan biaya (Rahayu, 2010:115). Dalam pemerintahan di Indonesia kita mengenal dengan istilah desentralisasi fiskal yang merupakan salah satu mekanisme transfer APBN untuk mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan dan memberikan stimulus terhadap aktivitas perekonomian masyarakat. Jadi harapannya dengan desentralisasi fiskal akan menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang sepadan dengan kewenangan urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah otonom.

Hal yang menarik dari desentralisasi fiskal ini adalah tanggung jawab yang jelas pada tingkat pemerintahan. Tanggung jawab ini mencakup rancangan dan penetapan berbagai aspek yang terkait, sehingga menimbulkan berbagai pertanyaan seperti : (Machfud, 2001)

1. Jenis pengeluaran apa yang akan dilakukan.
2. Jenis penerimaan apa yang harus dipungut dan berapa tarif yang akan ditentukan.
3. Bagaimana seharusnya bantuan intrapemerintah dan bagi hasil digunakan untuk mengatasi kesenjangan antara pengeluaran dan penerimaan di tingkat pemerintahan daerah dan dapat memberikan intensif yang tepat bagi daerah.
4. Tingkatan pemerintahan yang mana yang tepat untuk membiayai pengeluarannya melalui pinjaman yang berasal dari dalam atau luar negeri, swasta, atau pabrik.
5. Tingkatan pemerintahan yang mana yang bertanggung jawab terhadap sistem administrasi perpajakan dan manajemen pengeluaran publik.
6. Tingkatan pemerintah yang mana yang harus mendesain dan menjalankan seluruh peraturan.
7. Bagaimana seharusnya peraturan-peraturan seharusnya dapat diharmonisasikan dengan baik dan secara menyeluruh, komprehensif di dalam tingkatan pemerintahan yang berbeda

2.1.4 Pendapatan Daerah

Dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, didalamnya menyebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari.
 - a) Pajak daerah yaitu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan melalui peraturan daerah
 - b) Retribusi daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran/pemakaian karena memperoleh jasa yang diberikan oleh daerah
 - c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yaitu penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat
 - d) Lain-lain PAD yang sah yaitu penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah, seperti hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, dan lain-lain.
- 2) Dana perimbangan, yang terdiri dari:
 - a) Dana bagi hasil
 - b) Dana alokasi umum
 - c) Dana alokasi khusus

- 3) Pinjaman daerah
- 4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Salah satu sumber penerimaan daerah adalah berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana Pendapatan Asli Daerah merupakan bagian dari sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pertumbuhan komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain lain PAD yang sah akan menjadi faktor yang penting dalam mendorong pertumbuhan PAD.

Menurut Santosa dan Rahayu (2005), Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD maka menunjukkan bahwa daerah itu mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang. PAD diartikan sebagai penerimaan dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan Undang-undang yang berlaku.

Dalam mengestimasi potensi PAD, diperlukan informasi dan tolak ukur yang riil. Salah satu tolak ukur finansial yang dapat digunakan untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi adalah dengan mengukur seberapa jauh kemampuan keuangan suatu daerah. Kemampuan keuangan daerah ini, biasanya diukur dari besarnya proporsi/kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap anggaran pendapatan daerah. (Susanawati, 2014).

2.1.5 Retribusi Daerah

Retribusi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Retribusi daerah merupakan salah satu pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang didasarkan atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah yang manfaatnya secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Karakteristik pemungutan retribusi daerah adalah sebagai berikut :

1. Dapat dipungut apabila ada jasa yang disediakan pemerintah daerah dan dinikmati oleh orang atau badan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pihak yang membayar Retribusi Daerah mendapatkan imbalan atau jasa secara langsung dari pemerintah daerah.
3. Wajib Retribusi yang tidak memenuhi kewajiban pembayarannya dapat dikenai sanksi ekonomis. Artinya, apabila yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban tersebut maka yang bersangkutan tidak memperoleh jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah.
4. Hasil penerimaan Retribusi Daerah disetorkan ke kas daerah.

5. Digunakan untuk menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 objek retribusi terdiri daritiga kelompok jasa antara lain Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu, Zuraida (2012:88) menyebutkan bahwa kriteria ketiga kelompok tersebut sebagai berikut :

1. Retribusi Jasa Umum.

- a) Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu.
- b) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- c) Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemafaatan umum.
- d) Jasa tersebut hanya diberikan kepada orang pribadi atau badan yang membayar retribusi dengan memberikan keringanan bagi masyarakat yang tidak mampu.
- e) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraan.
- f) Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
- g) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

2. Retribusi Jasa Usaha

- a) Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu.
- b) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang sebenarnya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

- a) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang disediakan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
- b) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
- c) Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dari retribusi perizinan.

Dari beberapa jenis retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang, berikut klasifikasi jenis retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 yang terdapat pada tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Klasifikasi Retribusi Daerah

Jasa Umum	Jasa Usaha	Perizinan Tertentu
a. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.	a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.	a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Jasa Umum	Jasa Usaha	Perizinan Tertentu
b. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.	b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.	b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
c. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.	c. Retribusi Tempat Pelelangan.	c. Retribusi Izin Ganguan.
d. Retribusi Pengolahan Limbah Cair.	d. Retribusi Terminal.	d. Retribusi Izin Trayek.
e. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.	e. Retribusi Tempat Khusus Parkir.	e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.
f. Retribusi Pelayanan Pendidikan	f. Retribusi Tempat Penginapan atau Pesanggrahan atau Villa.	
g. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	g. Retribusi Rumah Potong Hewan.	
	h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	
	i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.	
	j. Retribusi Pnyebrangan di Air.	
	k. Retribusi Produksi Usaha Daerah	

Sumber : UU No 28 Tahun 2009

2.2. Kajian Variabel Penelitian

2.2.1 Kinerja Retribusi Daerah

Menurut Bawuna,dkk (2016) mendefinisikan penilaian kinerja sebagai suatu tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas perusahaan

yang digunakan sebagai umpan balik yang akan memberikan informasi tentang pelaksanaan suatu rencana. Penilaian kinerja dapat dilakukan oleh semua pihak yang berkepentingan dalam perusahaan. Manfaat Pengukuran Kinerja antara lain, memastikan pemahaman para pelaksana akan ukuran yang digunakan untuk pencapaian kinerja, memastikan tercapainya rencana kinerja yang telah disepakati, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkannya dengan rencana kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja, memberikan penghargaan dan hukuman yang obyektif atas prestasi pelaksana yang telah diukur sesuai dengan system pengukuran kinerja yang telah disepakati, menjadi alat komunikasi antar bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi, mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi, membantu memahami proses kegiatan pemerintah, memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif dan menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan .

Rasio pengukuran kinerja penerimaan retribusi daerah dalam penelitian ini yaitu menggunakan:

a. Rasio Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD

Rasio ini yaitu bertujuan untuk membandingkan realisasi penerimaan retribusi daerah dengan realisasi penerimaan PAD. Baik total retribusi daerah terhadap PAD, perjenis retribusi daerah terhadap PAD ataupun perjenis retribusi daerah terhadap total retribusi daerah.

b. Rasio Pertumbuhan Retribusi Daerah

Rasio ini bertujuan untuk mengukur seberapa besar pemerintah daerah dalam meningkatkan pertumbuhan suatu daerah serta dapat mempertahankan keberhasilan ditahun selanjutnya.

c. Rasio Efektifitas Retribusi Daerah

Rasio efektivitas retribusi daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan retribusi daerah sesuai dengan jumlah penerimaan retribusi daerah yang ditargetkan. Rasio efektivitas dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan Retribusi Daerah dengan target penerimaan Retribusi Daerah (dianggarkan).

2.2.2 Potensi Pendapatan Daerah

Menurut Mardiasmo dan Makhfatih (2000) potensi pendapatan daerah adalah kekuatan yang ada di suatu daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan tertentu. Untuk melihat potensi sumber pendapatan daerah dibutuhkan pengetahuan tentang perkembangan beberapa variabel-variabel yang dapat dikendalikan (yaitu variabel-variabel ekonomi), dan yang tidak dapat dikendalikan (yaitu variabel-variabel non-ekonomi) yang dapat mempengaruhi kekuatan sumber-sumber pendapatan daerah.

Retribusi daerah sebagai salah satu komponen PAD yang merupakan penerimaan yang diterima oleh pemerintah daerah setelah memberikan pelayanan tertentu kepada penduduk mendiami wilayah yurisdiksinya. Perbedaan yang tegas antara pajak daerah dan retribusi daerah terletak pada kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah. Jika pada pajak daerah kontraprestasi tidak

diberikan secara langsung, maka pada retribusi daerah kontribusi diberikan secara langsung oleh pemerintah daerah kepada penduduk yang membayar retribusi tersebut (Riduansyah, 2003).

Beberapa indikator yang biasa digunakan untuk menilai Pajak dan Retribusi Daerah, yaitu:

- 1) Hasil (*Yield*), yaitu memadai tidaknya suatu pajak dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayainya, stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besarnya hasil pajak tersebut.
- 2) Keadilan (*Equity*), dasar pajak dan kewajiban membayarnya harus jelas dan tidak sewenang-wenang. Pajak harus adil secara horizontal, artinya beban pajak harus sama antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama. Pajak harus adil secara vertical, artinya beban pajak harus lebih banyak ditanggung oleh kelompok yang memiliki sumber daya yang lebih besar.
- 3) Efisiensi ekonomi. Pajak/retribusi daerah hendaknya mendorong atau setidaknya tidak menghambat penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif dalam kehidupan ekonomi
- 4) Kemampuan untuk melaksanakan (*Ability to implement*), pajak harus dapat dilaksanakan baik dari aspek politik maupun administratif.
- 5) Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (*Suitability as local revenue sources*), adanya kejelasan kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan dan tempat memungut pajak hendaknya sama dengan tempat akhir beban pajak.

2.2.3 Matriks Potensi Retribusi Daerah

Menurut Wahyono (2009) dalam pengukuran potensi Retribusi Daerah menggunakan matriks potensi terdapat empat kategori hasil pengukuran yaitu:

a) Prima

Pajak Daerah termasuk dalam kategori prima, jika tingkat pertumbuhan dan kontribusinya tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Retribusi Daerah memberikan kontribusi yang besar (sangat potensial) bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tingkat pertumbuhannya semakin meningkat atau cenderung stabil.

b) Potensial

Retribusi Daerah termasuk dalam kategori potensial, jika tingkat pertumbuhannya rendah namun kontribusinya tinggi. Kategori menandakan kontribusi cukup besar namun pengelolaannya belum baik.

c) Berkembang

Retribusi Daerah termasuk dalam kategori berkembang, jika tingkat pertumbuhan tinggi namun kontribusinya rendah.

d) Terbelakang

Retribusi Daerah termasuk dalam kategori terbelakang, jika tingkat pertumbuhan dan kontribusinya rendah. Kategori ini menandakan belum baiknya Retribusi Daerah.

2.2.4 Proyeksi Retribusi Daerah

Dalam meningkatkan penerimaan retribusi daerah perlu disusun suatu perencanaan angka target penerimaan retribusi daerah yang tepat dan optimal dengan menggunakan model proyeksi penerimaan retribusi daerah yang mampu menghasilkan angka proyeksi yang sesuai dengan kondisi ekonomi yang sedang dan akan terjadi, dan mampu menjelaskan pengaruh kebijakan pemerintah

terhadap penerimaan retribusi daerah. Beberapa penelitian terdahulu menggunakan metode *least square* dan anuitas untuk menentukan proyeksi penerimaan retribusi daerah ditahun mendatang.

Sartika (2019) yang meneliti mengenai proyeksi penerimaan retribusi daerah Kab/ Kota di Sumatera barat tahun 2017-2020 menggunakan metode anuitas dalam menentukan proyeksi penerimaan retribusi daerah. Dalam hasil penelitiannya proyeksi penerimaan retribusi daerah tidak selalu menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, ada beberapa Kab/ Kota di Sumatera Barat yang mengalami penurunan penerimaan dari tahun ke tahun. Sedangkan dalam penelitian Kannapadang (2015) yang meneliti mengenai proyeksi retribusi daerah Kabupaten Toraja Utara tahun 2015-2019 menunjukkan hasil proyeksi yang selalu meningkat setiap tahunnya, meskipun dalam hal ini metode penelitian menggunakan metode *least square* namun hasil selalu menunjukkan peningkatan penerimaan retribusi daerah selama tahun 2015-2019. Metode yang digunakan menenentukan hasil akhir dari perhitungan proyeksi beberapa tahun mendatang.

2.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya, berikut tabel ringkasan penelitian terdahulu.

Tabel 2. 2 Ringkasan Penelitian Terdahulu

1	Nama dan Tahun	Lumikis, dkk (2015)
	Judul	Analisis Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di seluruh Kabupaten/ Kota Provinsi Maluku Utara.
	Metode	Penelitian ini menggunakan analisis

	Penelitian	komparatif dan analisis data historis.
	Hasil Penelitian	Realisasi pertumbuhan penerimaan Pajak Daerah yaitu kenaikan 43% pada tahun 2011. Kemudian mengalami penurunan 19% pada tahun 2012. Pada tahun 2013 mengalami kenaikan 50%. Sedangkan pada tahun 2014 mengalami penurunan 5%. Rata-rata tingkat kenaikan potensi Pajak Daerah adalah sebesar 29%. Sedangkan realisasi penerimaan Retribusi Daerah yaitu penurunan -53% pada tahun 2011. Kemudian mengalami kenaikan 80% pada tahun 2012. Di tahun 2013 mengalami kenaikan 130%. Sedangkan di tahun 2014 mengalami kenaikan 152%. Rata-rata tingkat kenaikan potensi Retribusi Daerah adalah sebesar 77%.
2	Nama dan Tahun	Baihaqi (2011)
	Judul	Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu
	Metode Penelitian	Metode analisis dalam penelitiann ini adalah analisis kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah, analisis kontribusi komponen PAD terhadap PAD dan analisis kontribusi komponen PAD terhadap pendapatan daerah, analisis pertumbuhan PAD dan pendapatan daerah.
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu periode 2005-2008 masing-masing adalah pajak daerah 69,48%, retribusi daerah 18,25%, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 3,03% dan lain-lain PAD yang sah 9,24%. Kontribusi komponen PAD terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu periode 2005-2008 masing-masing : pajak daerah 20,51%, retribusi daerah 5,56%, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 0,91% dan lain-lain PAD. Tingkat pertumbuhan PAD dan

		Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu periode 2005-2008 masing-masing adalah 23,96% dan 51,38%.
3	Nama dan Tahun	Nurlian,dkk (2018)
	Judul	Analisis Kontribusi Dan Potensi Retribusi Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Keerom, Papua)
	Metode Penelitian	Metode penelitian bersifat analisis deskriptif dengan teknik pencarian data memakai studi kepustakaan dan wawancara
	Hasil Penelitian	Berdasarkan hasil analisis potensi dari masing-masing sektor Retribusi Daerah berdasarkan variabel kontribusi, pertumbuhan, dan efektivitas, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa retribusi pelayanan kesehatan merupakan retribusi yang tergolong berpotensi, karena berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, retribusi pelayanan kesehatan memiliki kontribusi yang cukup besar walaupun dengan tingkat pertumbuhan rata-rata yang relatif rendah. Dengan demikian sektor tersebut diharapkan mampu untuk terus diandalkan sebagai sektor Retribusi Daerah andalan Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan PADnya. Walaupun Demikian Bukan Berarti mengharapkan peningkatan jumlah pasien yang berobat, melainkan lebih meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan sehingga lebih intensif untuk memeriksakan kesehatannya secara rutin, sehingga dengan sendirinya penerimaan retribusi daerah di bidang pelayanan kesehatan semakin meningkat pula.
4	Nama	Liputo, dkk. (2017)
	Judul	Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
	Metode	Metode penelitian menggunakan metode

	Penelitian	kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus dan data yang diperoleh berasal dari wawancara yang mendalam.
	Hasil Penelitian	<p>- Potensi retribusi daerah di Kabupaten Gorontalo adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Retribusi daerah yang potensi penerimaannya tergolong prima adalah retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi izin gangguan/keramaian. 2. Retribusi daerah yang potensi penerimaannya tergolong potensial adalah retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan pasar, retribusi pasar grosir/pertokoan, retribusi terminal dan retribusi tempat rekreasi dan olahraga. 3. Retribusi daerah yang potensi penerimaannya tergolong berkembang adalah retribusi pengujian kendaraan bermotor dan retribusi menarqa komunikasi. 4. Retribusi daerah yang potensi penerimaannya tergolong terbelakang adalah retribusi persampahan/kebersihan, retribusi parker tepi jalan umum, retribusi tempat parker khusus, retribusi rumah potong hewan, retribusi penjualan produk usaha daerah dan retribusi izin trayek. <p>- Kendala-kendala dalam penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Gorontalo antara lain : :Sumber Daya Manusia, fasilitas-fasilitas yang kurang memadai, kurangnya pengawasan, peneraapan sanksi yang belum maksimal, kurangnya koordinasi dan kurangnya sosialisasi.</p> <p>- Upaya-upaya untuk mengatasi kendala tersebut dengan melakukan kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Intensifikasi berupa perubahan tarif retribusi, pelaksanaan sosialisasi, peningkatan

		<p>kualitas SDM melalui pelatihan, meningkatkan pengawasan atas pemungutan retribusi dan meningkatkan kualitas pelayanan dengan melakukan peremajaan fasilitas.</p> <p>2. Ektensifikasi dengan melakukan pendataan wajib retribusi untuk menjangkau wajib retribusi baru dan menggali potensi penerimaan dari sumber retribusi sesuai ketentuan UU No.28 Tahun 2009.</p> <p>3. Pemerintah Daerah memberikan intensif kepada SKPD yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah atas pencapaian kinerja tertentu yang disebut dengan upah pungut.</p>
5	Nama dan Tahun	Dhyni Inka Syafitri (2016)
	Judul	Analisis Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah).
	Metode Penelitian	Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif dengan menghitung rasio efektivitas, rasio tingkat pertumbuhan dan rasio kontribusi pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah.
	Hasil penelitian	Hasil penelitian menunjukkan Berdasarkan rasio efektivitas rata-rata pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah sangat efektif karena selama tiga tahun pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah memiliki tingkat efektivitas lebih dari 100%. Berdasarkan hasil perhitungan tingkat pertumbuhan, rata-rata pertumbuhan pajak daerah tahun 2011-2013 menunjukkan rata-rata 45,73% dengan kriteria kurang berhasil, rata-rata pertumbuhan retribusi daerah sebesar -3,53 dengan kriteria tidak berhasil, dan Lain-lain PAD yang sah

		sebesar 38,53% dengan kriteria kurang berhasil. Kemudian kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah rata-rata 32,89% dengan kriteria sedang, kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah rata-rata 23,51% dengan kriteria cukup, dan kontribusi Lain-lain PAD yang sah terhadap pendapatan asli daerah rata-rata 39,28% dengan kriteria sedang.
6	Nama dan Tahun	Yuyus Yudistria (2015)
	Judul	Revenue Potential Retribution (Case Study Cianjur District)
	Metode Penelitian	Model yang digunakan untuk melihat sumber retribusi potensial dengan menggunakan potensi matriks didasarkan pada perhitungan retribusi pertumbuhan realisasi pendapatan dan kontribusi masing-masing jenis retribusi total pendapatan retribusi, sedangkan untuk mendapatkan nilai numerik dari retribusi yang diproyeksikan menggunakan ARIMA. Metode proyeksi sering disebut metode Box-Jenskins seri waktu.
	Hasil Penelitian	Hasil dari penelitian ini adalah pengolahan tipe potensial pungutan termasuk dalam kategori Prima ada 4 jenis retribusi seperti: Layanan pasar; Rekreasi dan Olahraga Retribusi; Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Gangguan. Sementara itu jatuh ke dalam kategori yang paling terbelakang. Hasil dari pemrosesan proyeksi pada jenis retribusi kemudian retribusi iuran diperkirakan akan naik cukup tinggi izin mendirikan bangunan (IMB)
7	Nama dan Tahun	Ruben S. Kannapadang (2015)
	Judul	Proyeksi Potensi Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Toraja Utara Periode 2015 S/D 2019
	Metode	Pada penelitian ini metode yang digunakan

	Penelitian	adalah forecasting, dengan teknik analisis regresi linear sederhana, dan menggunakan data historis penerimaan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Toraja Utara 5 tahun sebelumnya.
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi penerimaan daerah dari sumber pajak daerah naik sebesar 1,16% dan retribusi daerah sebesar 1,52%. Penelitian ini mengacu pada asumsi ceteris paribus, yang artinya bahwa keadaan masa lalu akan berulang tanpa perubahan pada masa yang akan datang.
8	Nama dan Tahun	Dewi Sartika, dkk. (2019)
	Judul	Analisis Potensi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
	Metode Penelitian	Metode analisis data pada penelitian ini adalah rasio efektifitas, analisis tingkat kontribusi dan analisis proyeksi dengan teknik anuitas.
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan dari sisi capaian pajak termasuk pada kriteria efektif. Dari perhitungan pertumbuhan tergolong tidak berhasil. Sedangkan dari kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah termasuk pada kriteria cukup baik. Capaian retribusi juga termasuk pada kriteria efektif. Dari perhitungan pertumbuhan tergolong tidak berhasil, dan dari kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah termasuk pada kriteria kurang baik. Diharapkan untuk masa yang akan datang, penerimaan pajak dan retribusi kabupaten/kota di Sumatera Barat bisa ditingkatkan lagi dengan upaya pemungutan yang maksimal dan pengawasan yang ketat.

Perbedaan dan persamaan yang terdapat pada penelitian terdahulu, yaitu :

1. Riri I.C Lumikis, David P.E. dan Saerang Ventje Ilat tahun 2015 dengan judul “Analisis Potensi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Seluruh Kabupaten/ Kota Provinsi Maluku Utara”. Persamaan penelitian ini dengan Lumikis, dkk (2015) adalah meneliti tentang potensi retribusi daerah, namun ada beberapa perbedaan penelitian Lumikis, dkk (2015) dengan penelitian ini antara lain, dalam penelitian ini hanya fokus meleiti mengenai potensi retribusi daerah, lalu metode yang digunakan analisis komparatif dan analisis data histori sedangkan dalam penelitian ini untuk mengetahui potensi retribusi daerah menggunakan analisis kontribusi retribusi daerah dan pertumbuhan retribusi daerah.
2. Baihaqi tahun 2011 dengan judul “Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu.” Persmaaan penelitian yang dilakukan Baihaqi (2011) dengan penelitian ini adalah menggunakan perhitungan analisis kontribusi yang sama, adapun beberapa perbedaan antara lain, dalam penelitian Baihaqi (2011) penelitian membahas mengenai kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah, sedangkan dalam penelitian ini kontribusi yang diteliti adalah kontribusi perjenis retribusi daerah terhadap total retribusi, kontribusi perjenis retribusi daerah terhadap PAD dan kontribusi total retribusi daerah terhadap PAD.

3. Nurlian, Siti Rofingatun dan Ivana Wamafma tahun 2018 dengan judul “Analisis Kontribusi dan Potensi Retribusi Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Keerom).” Persamaan penelitian ini dengan penelitian Nurlian, dkk (2018) adalah sama-sama meneliti mengenai kontribusi dan potensi retribusi daerah, adapun perbedaan yaitu dalam penelitian Nurlian, dkk (2018) jenis retribusi yang diteliti adalah retribusi daerah yang ada pada Kabupaten/Kota sedangkan pada penelitian ini jenis retribusi daerah adalah jenis yang ada pada retribusi daerah tingkat Provinsi.
4. Rahma Dewi Liputo, Jullie J. Sondakh dan Jessy D.L Warongan tahun 2017 dengan judul “Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo.” Persamaan penelitian ini dengan penelitian Liputo, dkk (2017) adalah meneliti mengenai potensi retribusi daerah, sedangkan terdapat perbedaan diantaranya dalam penelitian Liputo, dkk (2017) selain menggunakan perhitungan analisis kontribusi dan pertumbuhan untuk menentukan potensi retribusi daerah, wawancara kepada Pemerintah Kabupaten juga dilakukan sedangkan dalam penelitian ini tidak ada wawancara.
5. Dhyni Inka Syafitri tahun 2016 dengan judul “Analisis Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah).” Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Syafitri (2016) dengan penelitian ini adalah menggunakan rasio kontribusi

dan pertumbuhan sedangkan perbedaannya antara lain dalam penelitian ini hanya meneliti retribusi daerah sedangkan dalam penelitian Syafitri (2016) meliti mengenai pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah.

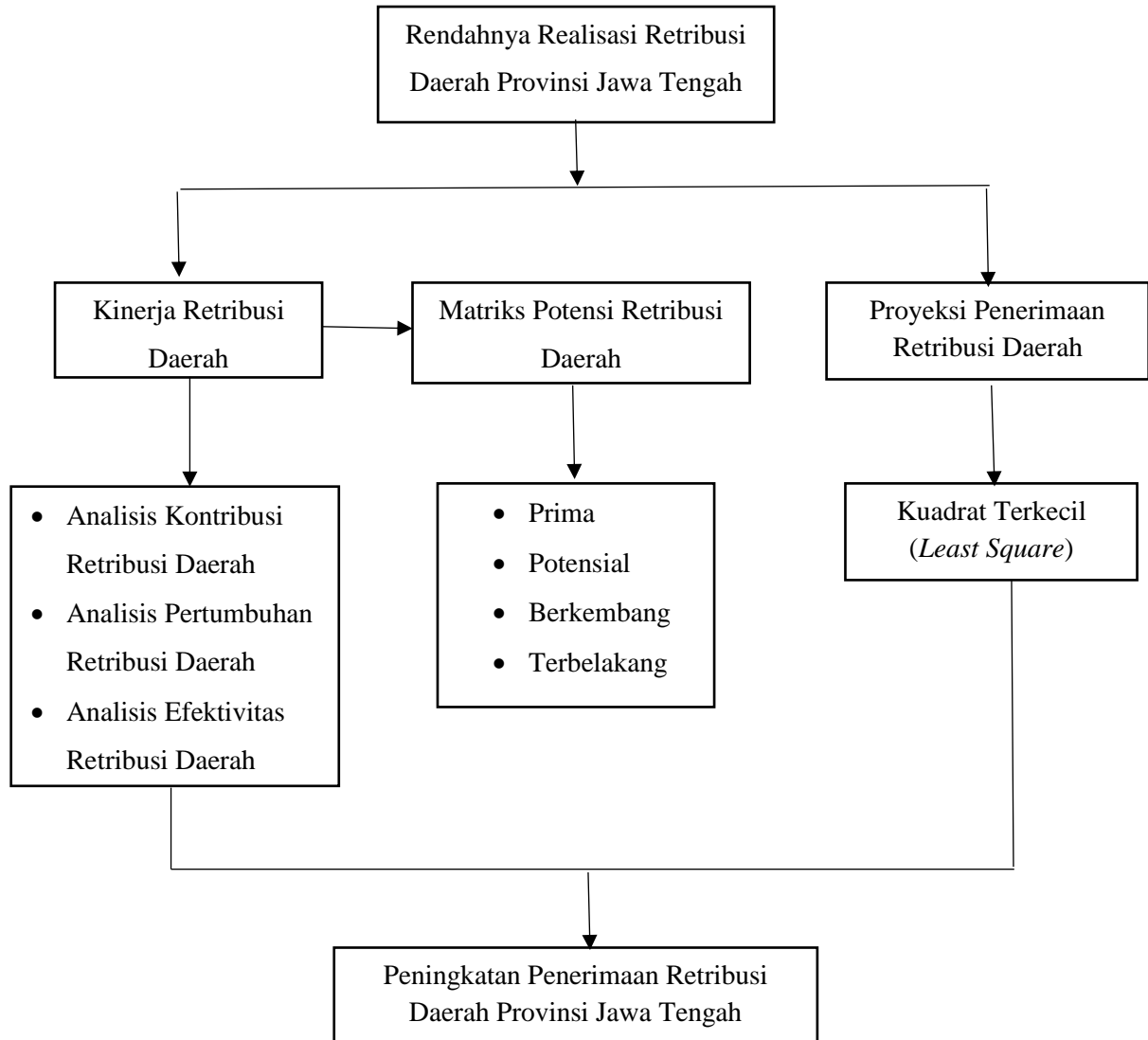
6. Yuyus Yudistria tahun 2015 dengan judul “Revenue potential Retribution (Case Study Cianjur District).” Persamaan dalam penelitian Yudistria (2015) dengan penelitian ini adalah meneliti mengenai retribusi daerah, adapun perbedaan yaitu Yudistria (2015) dalam menentukan matriks potensi menggunakan ARIMA sedangkan dalam penelitian ini matriks potensi ditentukan melalui rata-rata kontribusi dan tingkat pertumbuhan.
7. Ruben S. Kannapadang tahun 2015 dengan judul “Proyeksi Potensi Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Toraja Utara Periode 2015 S/D 2019.” Persamaan penelitian Kannapadang (2015) dengan penelitian ini adalah menyusun proyeksi penerimaan retribusi daerah dengan menggunakan teknis analisis yang sama yaitu regresi linier berganda kuadrat terkecil. Namun ada beberapa perbedaan antara lain, Kannapadang (2015) memproyeksikan penerimaan retribusi daerah lima tahun kedepan sedangkan dalam penelitian ini proyeksi penerimaan retribusi daerah enam tahun kedepan. Selanjutnya Kannapadang (2015) tidak meleliti proyeksi penerimaan retribusi daerah saja melainkan pajak daerah juga.
8. Dewi Sartika, Atika Ulfa dan Andre Ilyas tahun 2019 dengan judul “Analisis Potensi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat.” Persamaan penelitian Dewi Sartika,dkk (2019) dengan penelitian ini adalah memproyeksikan penerimaan retribusi daerah, namun terdapat beberapa perbedaan diantaranya dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah *least square* sedangkan dalam Dewi Sartika, dkk (2019) untuk memproyeksikan penerimaan retribusi daerah menggunakan teknik analisis anuitas.

2.4. Kerangka Berpikir

Retribusi daerah Jawa Tengah pada tahun 2012-2018 merupakan penyumbang PAD terendah dibandingkan dengan sumber penerimaan PAD lainnya. Dengan demikian perlu adanya penggalian potensi penerimaan retribusi daerah agar penerimaan retribusi daerah dapat meningkat.

Dalam penelitian ini untuk mengukur kinerja retribusi daerah adalah menggunakan beberapa teknik analisis diantaranya, analisis kontribusi retribusi daerah, analisis pertumbuhan retribusi daerah dan efektivitas retribusi daerah. Kemudian untuk menentukan potensi retribusi daerah dengan matriks potensi berdasarkan pada hasil analisis kontribusi retribusi daerah dan pertumbuhan retribusi daerah. Untuk mengetahui perkiraan penerimaan retribusi 2019-2024 menggunakan proyeksi penerimaan daerah dengan metode kuadrat terkecil (*least square*). Dengan ketiga teknik analisis tersebut diharapkan adanya penguatan penerimaan retribusi daerah Provinsi Jawa Tengah. Berikut kerangka berpikir yang terdapat pada gambar 2.1.



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Provinsi Jawa Tengah baik secara agregat dan perjenis retribusi daerah memiliki rata-rata dibawah 1% yang artinya sangat kurang berkontribusi terhadap PAD, sedangkan kontribusi perjenis retribusi daerah terhadap total retribusi daerah memiliki rata-rata 0%-42,5%. Pertumbuhan agregat retribusi daerah tahun 2012-2018 memiliki rata-rata sebesar 6,64%, sedangkan pertumbuhan perjenis retribusi daerah tahun 2012-2018 menunjukkan angka positif dan negatif. Pertumbuhan tertinggi adalah retribusi biaya cetak peta sebesar 108,5% dan terendah adalah retribusi pelayanan tera/ tera ulang sebesar -15,4% Efektivitas agregat retribusi daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2018 memiliki rata-rata 101,9% sehingga termasuk kedalam kategori sangat efektif. Sedangkan efektivitas tertinggi pada perjenis retribusi daerah adalah retribusi biaya cetak peta sebesar 252,2% dan terendah adalah retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan dan retribusi pelayanan tempat olahraga sebesar 0,0%.
2. Pada perhitungan matriks potensi perjenis retribusi daerah terhadap PAD, jenis retribusi yang termasuk kedalam kategori potensial antara lain retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan tera/tera ulang, retribusi

pemakaian kekayaan daerah, retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa dan retribusi penjualan produksi usaha daerah. Sedangkan pada matriks potensi perjenis retribusi daerah terhadap total retribusi daerah menunjukkan hasil yang berbeda, jenis retribusi yang termasuk kedalam kategori potensial adalah retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pemakaian kekayaan daerah dan retribusi penjualan produksi usaha daerah. Dengan demikian dari hasil kedua matriks potensi diatas retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pemakaian kekayaan daerah dan retribusi penjualan produksi usaha daerah baik dari segi perhitungan kontribusinya terhadap PAD atau total retribusi daerah sama-sama termasuk kedalam kategori potensial.

3. Proyeksi penerimaan agregat retribusi daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2024 dengan metode kuadrat terkecil menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Namun pada proyeksi penerimaan perjenis retribusi daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2024 beberapa jenis retribusi daerah menunjukkan penurunan penerimaan setiap tahunnya retribusi tersebut adalah retribusi tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa, retribusi tempat pelelangan dan retribusi izin trayek. Dan jenis retribusi selain retribusi tersebut menunjukkan peningkatan penerimaan setiap tahunnya pada proyeksi tahun 2019-2024.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka saran yang dapat diberikan antara lain sebagai berikut :

1. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai retribusi daerah harus lebih digalakkan agar terciptanya kesadaran untuk menjalankan kewajibannya dalam berkontribusi langsung untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah yang nantinya akan berdampak pada peningkatan PAD.
2. Pemerintah perlu meningkatkan strategi dalam penerimaan retribusi daerah yang berpotensi dalam penerimaan retribusi daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Lebih ditingkatkan lagi fungsi kontrol dari pemerintah terhadap instansi terkait demi terciptanya kinerja yang lebih baik lagi sehingga tahun-tahun selanjutnya dapat memberikan hasil penerimaan retribusi daerah yang optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengelola Pendapatan Daerah. 2019. *Pajak daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah*.
- Badan Pusat Statistik Jawa Tengah Jawa Tengah dalam Angka 2015.
- Badan Litbang Depdagri RI dan FISIPOL-UGM. 1991. *Pegukuran Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab*, Jakarta.
- Baihaqi. 2011. Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu. *Jurnal Akuntansi Vol. 1 No. 3*, 246-266.
- Bhattarcharyaa, S. L. 2017. Resource Discovery an The Politics of Fiscal Decentralization. *Journal of Comparative Economics 000*, 1-17.
- Caprioli, F. 2011. Optimal Fiscal Policy Under Learning . *Journal of Economic Dynamics & Control 58 pp*, 101-124.
- Dewi Sartika, A. U. 2019. Analisis Potensi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/KOta di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas. Vol.21 No.1*.
- Direktorat Jenderal Perimbangan keuangan Daerah Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2017.
- DR. H.M. Safi'I, M. 2008. *Paradigma Baru Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Malang: Averroes Press.
- Guritno Mangkusubroto. 2003. *Ekonomi Publik*. PBF E UGM: Yogyakarta
- Istiqomah, Nurul. 2017. Analysis of Parking and Market Service Levies Potential for The Improvement of Regional Auotomy in Surakarta. *Global Confrence on Business and Sosial Science Series*.
- Jufrizen, J. 2014. Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Parkir Pada Pusat-pusat Perbelanjaan Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis 13(1)*, 30-45.
- Kannapadang, R. S. 2015. Proyeksi Potensi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Toraja Utara Perode 2015 s/d 2019. *Ekosaint vol.1 no. 1*.
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (n.d.). *Pemerintah Andalkan Pertumbuhan Industri Pulau Jawa*. Retrieved from www.kemenperin.go.id:

<http://www.kemenperin.go.id/artikel/2806/Pemerintah-Andalkan%09Pertumbuhan-Industri-Pulau-Jawa>

- Kuncoro, M. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo dan Makhfatih, Ahmad. 2000. *Perhitungan Potensi Pajak dan Retribusi daerah di Kabupaten Magelang*. Laporan Akhir, Kerjasama Pemerintah Daerah Magelang dengan PAU-SE UGM. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI
- Nona Nelly Bawuna, L. K. 2016. Analisis Efektivitas Kinerja Penerimaan Pajak Daerah dan retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol. 16 No. 04*.
- Nurlian, S. R. 2018. Analisis Kontribusi dan Potensi Retribusi Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Keerom). *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah*.
- Prof. Dr. Mardiasmo, M. A. 2002. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Rahayu, A. S. 2010. *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rahma Dewi Liputo, J. J. 2017. Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo . *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing Vol.8 No.2*.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta: Legalitas.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 33 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta: Legalitas.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 28 Tahun 2009 tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta: Legalitas.
- Riduansyah, M. 2003. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Makara, Sosial Humaniora* , vol. 7, no. 2.
- Riri I.C Lumikis, D. P. 2015. Analisis POtensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di seluruh Kabupaten/ Kota Provinsi Maluku Utara. *ejournal-unsrat*.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta

- Sukardi. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Prakterknya*. Jakarta: Usaha Keluarga.
- Sidik, M. 2001. *Studi Empiris Desentralisasi Fiskal: Prinsip, Pelaksanaan di Berbagai Negara, serta Evaluasi Pelaksanaan Penyerahan Personil, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumentasi Sebagai Konsekuensi Kebijakan Pemerintah*. Batam: Sidang Pleno X ISEI.
- Susannawati, dkk. Analisis Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kota metro. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 3, No.3*.
- Syafitri, D. I. 2016. Analisis Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Diponogoro Journal of Economics*.
- Tjokrowinoto, M. 1987. *Politik Pembangunan: Sebuah Konsep Arah dan Strategi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Wahyuni, Priyo Hari Adi. 2009. Analisis Pertumbuhan dan Kontribusi Dana Bagi Hasil Terhadap Pendapatan Daerah (Studi pada Kabupaten/Kota se Jawa-Bali). *The 3rd National Conference UKWMS*.
- Widiyaningsih, Yuliana Endak, dkk. 2018. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012-2016 Serta Proyeksi Pada Tahun 2017 dan 2018. *EBBANK Vol.9, No.1 Halaman 22-31*.
- Yudistria, Y. 2015. Revenue potential Retribution (Case Study Cianjur District). *First International Coference on Economics and Banking (ICEB-15)*.
- Zuraida, I. 2012. *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.